

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2013**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Instansi Pemerintah se Kabupaten Malinau, serta terselesaikannya penyusunan LAKIP Kabupaten Malinau Tahun 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Pemerintahan yang baik ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu transparan, partisipasi dan akuntabilitas.

LAKIP Kabupaten Malinau Tahun 2013 memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan dengan sasaran dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Malinau Terwujudnya Kabupaten Malinau yang AMAN, NYAMAN dan DAMAI melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA).

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Kabupaten Malinau Tahun 2013.

Malinau, 17 Maret 2014

WAKIL BUPATI MALINAU

TOPAN AMRULLAH, S.Pd



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good governance*) merupakan prasyarat yang mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi yang dijabarkan sebagai berikut:

- Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.
- Transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.
- Demokrasi dan partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pelaporan yang dapat dipertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme .

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011-2016 telah menetapkan 28 sasaran dengan 88 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja keseluruhan 117,36% dengan interpretasi "**Sangat Berhasil**". Kesemuanya di implementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Sedangkan pelaksana program dan kegiatan tersebut adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Malinau.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam table berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
----	---------	-------------------------	--------	-----------	-----------



1.	Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah	Angka Partisipasi Murni (APM) :			
		- SD	86,98%	86,99%	100,01
		- SMP	86,7%	86,7%	100,00
		- SMA	74,75%	74,7%	99,93
		Angka kelulusan :			
		- SD	90,6%	100%	110,38
- SMP	72%	98,19%	136,38		
- SMA	69%	95,45%	138,33		
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	40%	40%	100,00
		Angka Melek Huruf	98,38%	98%	99,61
2.	Meningkatnya minat baca masyarakat	Pengunjung perpustakaan	2500 Org	2468 Org	98,72
		Prosentase arsip yang terpelihara	0,15%	10%	66,67
3.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	15%	14,7%	98,00
		Cakupan Masyarakat Malinau yang memperoleh jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	100%	100%	100,00
		Angka harapan hidup	68%	68,62%	100,91
		Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk)	0,22%	0,76%	345,45
		Angka kematian ibu per 1000 kelahiran hidup	9%	8%	88,89
4.	Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan	Prosentase Penurunan Kawasan kumuh	50%	60%	120,00
		Prosentase desa dengan jaringan irigasi dan pengairan	45%	69,55%	154,56
5.	Meningkatnya kesempatan kerja dikabupaten Malinau	Jumlah kesempatan kerja yang tersedia	95,4%	100%	104,82
		Persentase penurunan angka pengangguran	10%	5%	50,00
6.	Menurunnya	Jumlah penduduk	19,07%	19,07%	100,00



	kemiskinan di perdesaan	miskin			
		Prosentase penduduk miskin	23,89%	23,89%	100,00
7.	Meningkatnya kesempatan kerja di perdesaan	Persentase penduduk yang bekerja	95,4%	96%	100,63
		Persentase penurunan pengangguran	10%	12%	120,00
8.	Meningkatnya peran serta masyarakat didalam organisasi dan lembaga masyarakat desa	Persentase masyarakat yang terlibat dalam organisasi / lembaga masyarakat	50%	50%	100,00
9.	Meningkatnya kualitas dan Ketersediaan infrastruktur bagi masyarakat.	Panjang jalan dalam kondisi baik (km)	598 Km	176,86 Km	29,58
		panjang jembatan	1.07 M	4 M	373,83
		Persentase desa dengan jaringan irigasi dan pengairan yang terbangun	45%	69,55%	154,56
		Persentase KK desa dengan akses air bersih	55%	47,45%	86,27
		Persentase desa dengan akses listrik	77%	70%	90,91
		Persentase desa yang dapat diakses melalui transportasi :			
		- Darat	73.56%	73,56%	100,00
		- Sungai	85%	98%	115,29
		- Udara	5%	5%	100,00
		Tingkat intensitas transportasi antar kecamatan :			
		- Darat	20%	20%	100,00
		- Sungai	35%	35%	100,00
		- Udara	16%	16%	100,00
10.	Meningkatnya pusat-pusat kegiatan lokal (PKL), Pusat	Persentase Pertumbuhan produksi kecamatan	9%	10%	111,11



	Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PKL) di setiap kecamatan sebagai pusat produksi, perdagangan dan jasa	Pertumbuhan dan Pendapatan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	8%	10%	125,00
11.	Meningkatnya perdagangan barang dan jasa, dan investasi antara Kabupaten Malinau dan kabupaten/kota lainnya	Rasio nilai perdagangan yang Masuk dan Keluar	65%	50%	76,92
		Pertumbuhan Nilai perdagangan barang dan jasa	14%	16%	114,29
		Pertumbuhan nilai investasi	7%	8%	114,29
12.	Meningkatnya Daya Saing, Produktivitas UMKM dan Perusahaan Daerah	Koperasi Aktif	100%	101%	101,00
		Angka pertumbuhan produksi koperasi dan UMKM	7%	10%	142,86
		Pertumbuhan nilai pendapatan koperasi dan UMKM	6%	10%	166,67
		Jumlah tenaga kerja koperasi dan UMKM	3800 Org	3900 Org	102,63
		Pertumbuhan nilai produksi perusahaan daerah	9%	10%	111,11
13.	Meningkatnya Pertumbuhan nilai investasi perusahaan daerah	Pertumbuhan nilai penjualan perusahaan daerah :			
		- Perusda Intimung	7%	10%	142,86
		- Perusda PDAM	6%	10%	166,67
		Pertumbuhan nilai keuntungan perusahaan daerah :			
		- Perusda Intimung	7%	10%	142,86
		- Perusda PDAM	6%	10%	166,67
		Pertumbuhan Nilai perdagangan antar daerah	6,5%	10%	153,85



14.	Meningkatnya penanaman modal daerah	Pertumbuhan Jumlah perusahaan swasta	5%	10%	200,00
		Pertumbuhan nilai investasi swasta	6%	10%	166,67
15.	Meningkatnya produktivitas industri pengolahan berbasis pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Angka pertumbuhan nilai tambah sektor industri pengolahan	5,5%	10%	181,82
16.	Meningkatnya pendapatan daerah	Angka Pertumbuhan penerimaan Pajak dan Retribusi	5%	10%	200,00
17.	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan	Produktivitas pangan per ha per tahun (Ton)	36,61 Ton	27,252 Ton	74,44
		Jumlah produksi perkebunan per ha per tahun			
		- Kelapa Sawit (Ton)	3,993 Ton	2860 Ton	71.625,34
		- Karet (Ton)	1,008 Ton	850 Ton	84.325,40
		- Kakao (Ton)	1,05 Ton	900 Ton	85.714,29
		- Kopi (Ton)	1,17 Ton	980 Ton	83.760,68
		Jumlah produksi peternakan per tahun (Ekor)	443,96 Ekor	434,29 Ekor	97,82
Jumlah produksi perikanan per tahun (Ton)	838,4 Ton	670 Ton	79,91		
18.	Meningkatnya ketaatan, toleransi dan solidaritas masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama	organisasi agama yang aktif	8%	8%	100,00
		Persentase masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan	70%	70%	100,00
		Prosentase Penurunan kasus konflik antarpemeluk agama	80%	90%	112,50
19.	Meningkatnya kualitas	Rumah layak huni	80%	90%	112,50



	lingkungan hidup	Rumah Yang Bersanitasi	80%	90%	112,50
		Persentase emisi karbon dari jasa lingkungan dalam mengatasi perubahan lingkungan	45%	45%	100,00
20.	Meningkatnya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam	Persentase Kerusakan Lahan	36%	25%	69,44
		Persentase kasus sengketa Pengelolaan Lingkungan Hidup	25%	20%	80,00
21.	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan berkinerja baik	Opini BPK	WTP	WDP	
		Jumlah SKPD dengan status laporan kinerja baik	40 SKPD	18 SKPD	45,00
22.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tingkat kepuasan masyarakat	70%	65%	92,86
23.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pilkada Pemilu	85%	48,21%	56,72
		Persentase penyelesaian kasus sengketa pemilu dan pilukada	100%	100%	100,00
24.	Terwujudnya penegakan dan pengembangan hukum secara adil dan bertanggung jawab	Persentase Penurunan kasus kejahatan	27%	30%	111,11
25.	Meningkatnya peran serta pemuda didalam organisasi	Persentase pemuda yang berperan aktif dalam keorganisasian	70%	80%	114,29
		Persentase pemuda yang meraih prestasi seni, olah raga dan budaya	50%	60%	120,00
26.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam bidang	Jumlah lembaga / organisasi perempuan yang	22%	22%	100,00



	pembangunan.	aktif			
		Persentase perempuan yang aktif dalam Keorganisasian	70%	70%	100,00
		Jumlah kasus KDRT	2 Kali	1 kali	50,00
		Persentase Penurunan kasus perdagangan perempuan	95%	95%	100,00
27.	Meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	1%	5%	500,00
		Jumlah kasus perdagangan anak	1%	1%	100,00
28.	Meningkatnya kepariwisataan di Kabupaten Malinau	Peningkatan kunjungan Wisatawan	700 Org	5564 Org	794,86
		Angka pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata	23%	40%	173,91

JUMLAH ANGGARAN : 2.585.463.742.196,47

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2013 : 2.141.037.046.673,10



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	ix
Bab 1 PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
B. Kondisi Geografis	2
C. Kondisi Demografis	3
D. Struktur Organisasi	9
E. Maksud dan Tujuan	13
F. Sistematika Penyusunan LAKIP	15
Bab II PERENCANAAN STRATEGIS	
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah	17
1. VISI	17
2. MISI	19
3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	20
B. Penetapan Kinerja	43
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	61
B. Evaluasi dan analisis Kerja	47
C. Capaian Indikator Makro	72
Bab IV PENUTUP	155
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1 Rencana Kinerja Tahunan	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya tata Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna berhasil guna bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Malinau menuju good govermen dan clen govermen itulah maka jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau berisaha menyajikan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk kegiatan Tahun 2013. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas tahunan Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2013 ini disusun dalam empat bab masing-masing bab I merupakan Pendahuluan, Bab II berisi Perencanaan dan Penetapan Kinerja, Bab III berisi Akuntabilitas Kinerja, Bab IV berisi Penutup.

Materi yang disajikan pada laporan ini didasarkan atas dokumen Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2016

B. Pembentukan Pemerintah Kabupaten Malinau

Pemerintah Kabupaten Malinau, yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur, yang dituangkan dalam Lembaran Negara



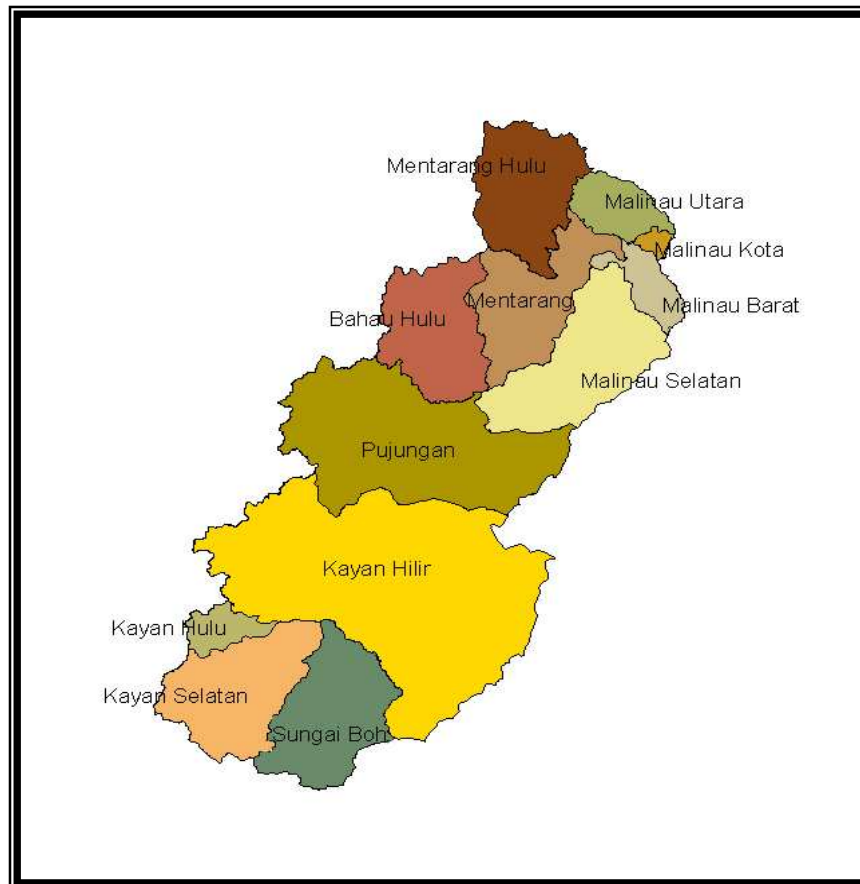
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896, berdasarkan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu daerah yang mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tersebut, Kabupaten Malinau yang merupakan Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan, dengan ibukota berkedudukan di Malinau, memiliki luas wilayah ± 39.766,33 km², yang terdiri atas 15 (lima belas) kecamatan, yaitu Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Selatan, Kecamatan Mentarang, Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kecamatan Malinau selatan Hilir dan Kecamatan Sungai Tubu

Secara umum wilayah administrasi Kabupaten Malinau memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Kabupaten Nunukan;
- Sebelah Timur Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur;
- Sebelah Selatan Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Sebelah Barat Negara Malaysia Timur - Serawak.

Peta wilayah Kabupaten Malinau:



(Peta Wilayah untuk Kecamatan Pemekaran tahun 2013 belum Rampung)

C. KONDISI GEOGRAFIS

Sesuai dengan kondisi geografis, Kabupaten Malinau beriklim tropika humida dengan curah hujan berkisar antara 2.500 ≥ 4.500 mm per tahun, temperatur udara rata 26 °C dengan perbedaan temperatur siang dan malam antara 5 °C – 7 °C, temperatur minimum umumnya terjadi pada bulan Nopember sampai dengan Januari, sedangkan temperatur maksimum terjadi antara bulan April sampai dengan bulan Oktober.

Kabupaten Malinau termasuk Kabupaten yang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang sangat potensial dan bervariasi jenisnya, antara lain, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan budi daya hasil-hasilnya, pertambangan (batu bara, timah, kaolin, pasir kuarsa, emas, dll) dan pariwisata.

Luas wilayah Kabupaten Malinau lebih kurang 39.766,33 km² dengan jumlah penduduk sampai tahun 2013 sebanyak 66.845 jiwa. jarak ibu kota malinau ke Tanjung Selor Ibu kota Provinsi Kalimantan Utara adalah 209 kilometer. Keadaan alam

Kabupaten Malinau sebagian besar merupakan dataran tinggi pegunungan serta perbukitan dan dataran rendah, memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi lahan agroindustri (pertanian, perkebunan, perikanan budi daya ikan dan udang galah).

Sebagai daerah pegunungan dan perbukitan, Kabupaten Malinau memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah pariwisata dan konservasi alam. Akan tetapi jika dilihat dari letak geografisnya, wilayah Kabupaten Malinau memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah perdagangan karbon, karena 91 % wilayahnya masih berupa hutan murni.

D. KONDISI DEMOGRAFIS

1. Letak Geografis

Kabupaten Malinau secara geografis terletak di wilayah bagian utara Kalimantan Utara yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara Malaysia yaitu negara bagian Serawak di sebelah Barat. Wilayah Kabupaten Malinau berada di daerah tropis dengan posisi geografis 1⁰21'36" sampai dengan 4⁰10'55" Lintang Utara dan 114⁰ 35' 22" sampai dengan 116⁰50'55" Bujur Timur dengan Luas wilayah sekitar 39.766,33 km² yang didominasi oleh wilayah daratan. Secara Administratif Kabupaten Malinau berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Nunukan.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau dan Kabupaten
- Sebelah Selatan : Kutai Timur.
berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat dan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kutai Kartanegara.
berbatasan dengan Negara Malaysia bagian Timur (Serawak).



Gambar 1.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Malinau



Kabupaten Malinau terdiri dari 15 kecamatan, 5 Kecamatan diantaranya berbatasan langsung dengan negara Malaysia, 2 Kecamatan merupakan penyangga perbatasan (lihat Gambar 1.2), dimana Kabupaten Malinau termasuk sebagai Kabupaten tertinggal dan perbatasan yang hanya dapat terjangkau melalui transportasi sungai dan udara yang menuntut biaya sangat tinggi dalam upaya peningkatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kabupaten Malinau.

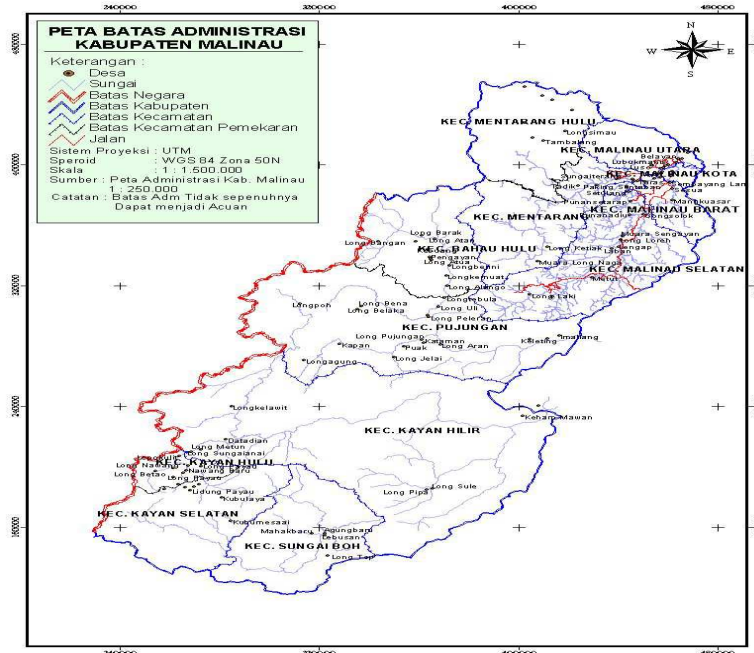
Keadaan topografi Kabupaten Malinau bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Selanjutnya juga dapat dibedakan atas kawasan perbukitan terjal disebelah utara bagian Barat, perbukitan sedang bagian tengah, dan daratan bergelombang landai dibagian Timur. Perbukitan terjal di sebelah Utara bagian Barat merupakan jalur pengunungan dengan ketinggian 1.500 m – 3.000m diatas permukaan laut. Keadaan perbukitan lereng ini memiliki sudut lereng lebih dari 30% dan untuk daerah yang merupakan dataran tinggi, kemiringan berkisar 8 – 15%. Sedangkan untuk Daerah perbukitan, kemiringan sangat terjal diatas 15%. Dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar antara 0-50%.

Ditinjau dari segi administrasi, wilayah Kabupaten Malinau terdiri dari 15 kecamatan, yakni:

1. **Kecamatan Malinau Kota**, terdiri atas 6 desa yakni: Desa Malinau Kota, Desa Malinau Hulu, Desa Malinau Hilir, Desa Tanjung Keranjang, Desa Batu Lidung, Desa Pelita Kanaan;
2. **Kecamatan Malinau Barat**, terdiri atas 9 desa yakni: Desa Tanjung Lapang, Desa Kuala Lapang, Desa Taras, Desa Sesua, Desa Sempayang, Desa Sentaban, Desa Long Knipe, Desa Long Bila, Desa Punan Bengalun;
3. **Kecamatan Malinau Utara**, terdiri atas 12 desa yakni: Desa Respen Tubu, Desa Semenggaris, Desa Putat, Desa Malinau Seberang, Desa Luso, Desa Belayan, Desa Kaliamok, Desa Lubak Manis, Desa Kelapis, Desa Salap, Desa Seruyung, Desa Sembuak Warod;
4. **Kecamatan Malinau Selatan**, terdiri atas 9 desa yakni: Desa Paya Saturan, Desa Punan Rian, Desa Laban Nyarit, Desa Nunuk Tanah Kibang, Desa Langap, Desa Long Loreh, Desa Sengayan, Desa Pelencau, Desa Bila Bekayuk,



5. **Kecamatan Mentarang**, terdiri atas 9 desa yakni: Desa Long Bisai, Desa Paking, Desa Long Gafid, Desa Harapan Maju, Desa Mentarang Baru, Desa Temalang, Desa Long Liku, Desa Lidung Keminci, Desa Pulau Sapi
6. **Kecamatan Mentarang Hulu**, terdiri atas 7 desa yakni: Desa Long Berang, Desa Long Sulit, Desa Long Mekatif, Desa Long Kebinu, Desa Semamu, Desa Long Pala dan Desa Long Simau.
7. **Kecamatan Pujungan**, terdiri atas 9 desa yakni : Desa Long Lame, Desa Long Aran, Desa Long Pua, Desa Long Paliran, Desa Belaka Pitau, Desa Long Jelet, Desa Long Ketaman, Desa Pujungan, Desa Long Bena;
8. **Kecamatan Bahau Hulu**, terdiri atas 6 desa yakni : Desa Long Alango, Desa Long Tebulo, Desa Long Uli, Desa Long Kemuat, Desa Long Berini, Desa Apau Ping;
9. **Kecamatan Sungai Boh**, terdiri atas 6 desa yakni : Desa Mahak Baru, Desa Dumu Mahak, Desa Long Lebusan, Desa Agung Baru, Desa Data Baru, Desa Long Top;
10. **Kecamatan Kayan Hulu**, terdiri atas 5 desa yakni : Desa Nawang Baru, Desa Long Temuyat, Desa Long Payau, Desa Long Betaoh, Desa Long Nawang;
11. **Kecamatan Kayan Selatan**, terdiri atas 5 desa yakni : Desa Long Ampung, Desa Long Uro, Desa Metulang, Desa Sungai Barang, Desa Lidung Payau;
12. **Kecamatan kayan Hilir**, terdiri atas 5 desa yakni : Desa Data Dian, Desa Sungai Anai, Desa Long Sule, Desa Long Metun, Desa Long Pipa;
13. **Kecamatan Malinau Selatan Hulu**, terdiri atas 8 Desa yakni : Desa Long Lake, Desa Punan Mirau, Desa Long Rat, Desa Halanga, Desa Metut, Desa Long Jalan, Desa Mahakramo Baru, Desa Tanjung Nanga.
14. **Kecamatan Malinau Selatan Hilir**, terdiri atas 8 Desa yakni : Desa Setulang, Desa Setarap, Desa Punan Setarap, Desa Batu Kajang, Desa Gong Solok, Desa Punan Gong Solok, Desa Long Adiu dan Desa Punan Long Adiu;
15. **Kecamatan Sungai Tubu terdiri dari 6** Desa yakni Desa Long Titi, Desa Long Ranau, Desa Rian Tubu, Desa Long Nyau, Desa Long Pada.



Gambar 1.2. Peta Administrasi Kabupaten Malinau

2. Gambaran Umum Demografi

Masalah kependudukan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan. Penduduk memegang peranan yang sangat vital yaitu sebagai objek maupun subjek dari pembangunan itu sendiri.

Kondisi kependudukan dapat dilihat dari tingkat kelahiran, kematian dan mutasi penduduk. Sedangkan untuk menentukan sasaran pembangunan data kependudukan sangat diperlukan baik mengenai jumlah, jenis kelamin, struktur, komposisi maupun penyebaran/kepadatan penduduk suatu wilayah. Berdasarkan hasil registrasi penduduk, pada tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Malinau sebanyak 66.845 jiwa yang terdiri dari 37.960 laki-laki dan 30.885 perempuan, sehingga rasio jenis kelaminnya adalah 116,43. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan, atau dengan kata lain setiap 14 penduduk laki-laki terdapat 1 penduduk perempuan.

Persebaran penduduk di Kabupaten Malinau terbesar ada di Kecamatan Malinau Kota sebesar 19.247 jiwa, disusul Kecamatan Malinau Utara dan Malinau Barat masing-masing sebesar 10.124 jiwa dan 8.157 jiwa. Sedangkan jumlah terkecil ada di Kecamatan Mentarang Hulu dan Kecamatan Kayan Hilir dengan persentase masing-masing sebesar 756 jiwa dan 1.352 jiwa. Untuk delapan Kecamatan lainnya persebaran penduduknya berkisar antara 2 - 12 persen.



Pada tahun 2012 kepadatan penduduk Kabupaten Malinau adalah 1,68 jiwa/km². Kepadatan penduduk untuk masing-masing kecamatan hampir tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Seperti pada tahun - tahun sebelumnya, jumlah penduduk pada tahun 2012 masih terkonsentrasi di Kecamatan Malinau Kota dan kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengannya. Untuk Kecamatan Malinau Kota kepadatannya 168,85 jiwa/Km². Kecamatan Malinau Utara sebesar 13,83 jiwa/km², Kecamatan Malinau Barat sebesar 11,75 jiwa/km² dan Malinau Selatan memiliki kepadatan sebesar 2,23 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Mentarang, Sungai Boh dan Kayan Hulu berkisar 1,98 – 0,71 jiwa/Km². Sedangkan Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Selatan, Pujungan, Bahau Hulu dan Mentarang Hulu adalah kecamatan-kecamatan dengan kepadatan kurang dari 1 jiwa/ km².

Kabupaten Malinau merupakan salah satu kabupaten yang paling luas wilayahnya pasca pemekaran wilayah di Kalimantan Utarar (UU No. 20 tahun 2012) yakni sekitar 54,8 persen dari luas Kalimantan utara , dengan jumlah penduduk yang paling sedikit. Ini berarti bahwa kurang seimbangnya antara jumlah penduduk dengan luas Kabupaten Malinau.

Tabel 2.1
Nama Kecamatan dan Jumlah Desa Dikabupaten Malinau
Tahun 2012

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah	
			Km ²	%
1	Kayan Hulu	5	4651,67	1,16
2	Sungai Boh	6	3.234,59	8,59
3	Kayan Hilir	5	11.876,64	29,90
4	Pujungan	9	6.762,92	16,57
5	Malinau Kota	6	122,92	0,31
6	Malinau Selatan	25	3.733,81	9,48
7	Malinau Utara	12	776,36	1,93
8	Malinau Barat	9	754,43	1,88
9	Mentarang	15	2.888,82	7,70
10	Kayan Selatan	5	3.234,59	9,48
11	Bahau Hulu	6	2.872,99	7,67
12	Mentarang Hulu	6	2.872,36	6,76
Jumlah		109	39.766,32	100

Sumber : Kabupaten Malinau Dalam Angka 2012



Berdasarkan hasil registrasi penduduk sampai akhir tahun 2010 jumlah keluarga di Kabupaten Malinau tercatat 16.336, dengan jumlah penduduk 70.717 berarti rata-rata penduduk per keluarga di Kabupaten Malinau adalah 4,33 atau dengan kata lain bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga adalah 4 jiwa.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2009, persentase angkatan kerja yakni penduduk yang bekerja ditambah penduduk yang sedang mencari pekerjaan adalah 75,29 persen terdiri dari 74,22 persen penduduk yang bekerja dan sisanya 1,07 persen yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja, yakni penduduk yang sekolah ditambah yang mengurus rumah tangga dan penduduk yang melakukan kegiatan lainnya sebanyak 24,71 persen. Dari jumlah tersebut 10,54 persen adalah sedang bersekolah, 10,86 persen mengurus rumah tangga dan 3,31 persen melakukan kegiatan lainnya.

Tabel 2.2
PROYEKSI PENDUDUK MENURUT KECAMATAN
2005 - 2011 *)

<i>Kecamatan</i>	2005	2006	2007	2008	2009	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kayan Hulu	4.717	5.117	5.552	6.024	6.536	7.091
Sungai Boh	2.290	2.485	2.696	2.925	3.173	3.443
Kayan Hilir	1.687	1.831	1.986	2.155	2.338	2.537
Pujungan	3.803	4.127	4.477	4.858	5.271	5.718
Malinau	14.024	15.216	16.508	17.911	19.434	21.085
Malinau Selatan	8.256	8.958	9.719	10.545	11.441	12.413
Malinau Barat	6.534	7.089	7.691	8.345	9.054	9.823
Malinau Utara	7.746	8.404	9.118	9.893	10.734	11.646
Mentarang	7.098	7.701	8.355	9.065	9.836	10.671
Jumlah	56.155	60.927	66.104	71.722	77.817	84.429

Kecamatan Kayan Selatan, Mentarang Hulu dan Bahau Hulu masih tergabung dengan kecamatan induknya,

*) berdasarkan hasil SP.2000 dan P4B 2003

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau



E. STRUKTUR ORGANISASI

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Malinau diberikan kewenangan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional. Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksudkan di atas terdiri atas kewenangan wajib meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah sosial; pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan; pelayanan kependudukan dan catatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan administrasi penanaman modal; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Malinau juga menyelenggarakan lain-lain urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malinau ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau yang telah diundangkan pada tanggal 11 Juni 2008, yang meliputi :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 2) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, yang terdiri atas:
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :
 - a) Bagian Tata Pemerintahan;
 - b) Bagian Hukum;
 - c) Bagian Perbatasan dan Kerja Sama;
 - d) Bagian Pertanahan.
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:



- a) Bagian Humas dan Protokol;
 - b) Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal;
 - c) Bagian Penyusunan Program.
3. Asisten Administrasi Umum membawahi :
- a) Bagian Pengelolaan Keuangan;
 - b) Bagian Organisasi;
 - c) Bagian Umum dan Aset.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 3) tentang Organisasi dan Tata Kerja.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 4) tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah, yang terdiri atas:
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 2. Dinas Pendapatan;
 3. Dinas Kesehatan;
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 5. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
 6. Dinas Kehutanan
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 8. Dinas Pertambangan dan Energi;
 9. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 10. Dinas Tata Kota;
 11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 12. Dinas Pekerjaan Umum;
 13. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 14. Dinas Perkebunan.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 5) tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri atas:
1. Inspektorat;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;



6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 7. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 8. Kantor Pelayanan Terpadu;
 9. Rumah Sakit Umum Daerah.
- e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 6) tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau,
- f. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, yang terdiri dari :
1. Kecamatan Malinau Kota
 2. Kecamatan Malinau Barat
 3. Kecamatan Malinau Utara
 4. Kecamatan Malinau Selatan
 5. Kecamatan Mentarang
 6. Kecamatan Mentarang Hulu
 7. Kecamatan Pujungan
 8. Kecamatan Bahau Hulu
 9. Kecamatan Sungai Boh
 10. Kecamatan Kayan Hulu
 11. Kecamatan Kayan Selatan
 12. Kecamatan kayan Hilir
 13. Kecamatan Malinau Selatan Hulu
 14. Kecamatan Malinau Selatan Hilir
 15. Kecamatan Sungai Tubu

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Malinau Tahun 2012 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Ketentuan ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Esensi dari sistem AKIP bagi Pemerintah Kabupaten Malinau adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian sektor publik di Kabupaten Malinau. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan Kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Pemerintah Kabupaten dapat diwujudkan melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang terencana dan terlaksana baik. Implementasi sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang memuat visi, misi dan tujuan/sasaran strategis pemerintah Kabupaten Malinau dan secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategik tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah Kabupaten Malinau yang diperoleh. Pada setiap akhir tahun pelaksanaan program/kegiatan, serta capaian kerjanya dikomunikasikan kepada *stakeholder* dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. **Pertama**, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi pemerintah Kabupaten Malinau untuk menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* (Presiden, DPRD dan masyarakat). **Kedua**, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2013 sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Malinau atas capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2012.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi menjadikan LAKIP 2013 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Malinau bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah Kabupaten Malinau dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja pemerintah Kabupaten Malinau dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.



F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sasaran yang bersifat strategis, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2013. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia, terbatas pada indikator input, output dan outcome. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya berasal dari APBN dan Loan/BLN yang juga dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau, disajikan secara terpisah dan tidak dilakukan pengukuran kinerja untuk masing-masing kegiatan tersebut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau selama Tahun 2013. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2013 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2013 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan dimasa datang.

Sistematika penyajian LAKIP Kabupaten Malinau Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan; menjelaskan secara ringkas profil Pemerintah Kabupaten Malinau dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 2013.

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja; menjelaskan rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Malinau untuk periode 2011-2016 dan rencana kinerja untuk Tahun 2013.

Bab III Akuntabilitas Kinerja; disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Akuntabilitas keuangan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, termasuk analisis terhadap capaian indikator efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Bab IV Penutup; menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP Kabupaten Malinau Tahun 2013 ini dan menguraikan saran-saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang